

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dilakukan sebagai proses penekanan pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan untuk memudahkan serta memahami arti judul yang dimaksud oleh penulis, akan diuraikan arti dan makna beberapa istilah sesuai judul penelitian. Berdasarkan penegasan judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahan persepsi terhadap tujuan penelitian dari beberapa istilah yang digunakan.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi “Analisis Strategi Penanganan Eksternalitas Ekonomi dari COVID-19 pada Pendapatan Masyarakat Lampung dalam Perspektif Ekonomi Syariah” yaitu sebagai berikut:

1. Eksternalitas Ekonomi

Eksternalitas menurut N Gregory Mankiw adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/pihak lain.¹ Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan maka disebut eksternalitas positif. Eksternalitas yang dimaksud dalam judul ini adalah dampak secara tidak langsung dari kebijakan yang di ambil pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19.

2. Pandemi COVID-19

Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo Nidovirales*. Dunia sedang

¹ Rita Yunus and Anas Iswanto Anwar, *Ekonomi Publik*, 1st ed. (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021). h. 204

diguncang oleh pandemik hebat bernama COVID-19 (*Corona Virus Disease*). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus COVID-19 sudah sulit dikendalikan.²

3. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.³ pendapatan yang dimaksud dalam judul ini yaitu pendapatan yang diterima masyarakat Lampung

4. Ekonomi Islam

Ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi syariahnya, yang harus sesuai dengan tuntunan syariahnya, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariahnya, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.⁴ Jadi ekonomi islam adalah proses pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan syariahnya islam dalam segala aktivitasnya

Berdasarkan dari penjelasan istilah-istilah diatas yang di maksud oleh judul ini adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam mengenai strategi pengangan eksternalitas atau dampak secara tidak langsung dari COVID-19 pada pendapatan masyarakat Lampung yang dikaji berdasarkan prinsip ekonomi syariahnya

² Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten" (Satgas COVID-19, mei 2021). h. 3

³ Fatmawati Lumintang, "Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur," *Emba*, 1, No. 3 (2013). h. 992

⁴ Vista Okta Frida Catharina, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Garudhawaca, 2020). h.5

B. Latar Belakang Masalah

Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/ pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan maka disebut eksternalitas positif. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain diluar aktivitas atau transaksi itu.

Menurut ekonomi islam eksternalitas adalah dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi sosial pihak lain, baik positif maupun negatif atau dampak dari keberadaan suatu usaha, yang berkaitan dengan masalah keadilan yang terjadi di masyarakat. dengan demikian, eksternalitas mempengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi masing-masing pelaku ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan.⁵ Seorang muslim harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah fil ardhi* (pemimpin di bumi) yang harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui yang kasus tersebut berasal dari Kota Wuhan, China yang berdampak pada kesejahteraan manusia. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru coronavirus. Pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” telah dikeluarkan oleh *Wuhan Municipal Health Committee*

COVID-19 merupakan sejenis virus dari *family Coronaviridae* yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada

⁵ Mariyana, “Eksternalitas Produk CPO Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)., h. 88

saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap COVID-19 akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia.⁶

Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah banyak kematian yang disebabkan dari virus ini baik di China maupun di Negara lain sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*). Hari ke hari kasus ini semakin meningkat dengan pesat hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai Pandemi Global.⁷

Dalam pandangan islam, wabah penyakit COVID-19 masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit COVID-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit COVID-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah COVID-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

⁶ “Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten.” h. 3

⁷ Fakhrol Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, “Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia,” *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi*, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4, no. 2 (2020). h. 184

Menurut *World Health Organization (WHO)*, *Corona Virus Disease 19 (COVID 19)* sampai saat ini telah tersebar kepada lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Sementara di Indonesia, COVID-19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi termasuk Lampung. Per tanggal 8 April 2021 jumlah penduduk yang terpapar positif coronavirus disease-19 (COVID-19) tersebar diberbagai provinsi di Indonesia yang berjumlah 1.552.880 jiwa, dengan kesembuhan pasien terinfeksi berjumlah 1.399.382 jiwa dan jumlah kematian 42.227 jiwa penduduk Indonesia.⁸

Berikut adalah tabel jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Terkontaminasi COVID-19
pada 18 Maret 2021

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Positif
1	Tulang bawang Barat	186
2	Way Kanan	113
3	Lampung Utara	1068
4	Lampung Barat	421
5	Pesisir Barat	244
6	Tanggamus	545
7	Pringsewu	431
8	Pesawaran	564
9	Bandar Lampung	4928
10	Lampung Selatan	817

⁸ Yordan Saputra, "Dampak Pandemi COVID-19 Dan Kebijakan Ppkm Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). h. 4

11	Metro	675
12	Lampung Timur	1014
13	Lampung Tengah	2130
14	Tulang Bawang	173
15	Mesuji	96
Jumlah		13.378

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 8 Maret 2021

Jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di seluruh provinsi Lampung hingga Selasa 1 Februari 2022 telah mencapai 49.975 orang sedangkan yang meninggal sebanyak 3.829 orang.⁹

COVID-19 menjadi perhatian yang sangat besar. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah lebih memilih jalur kebijakan dari dua arah, yaitu kebijakan substantifnya (pencegahan) sambil memfokuskan diri pada kebijakan perbaikan ekonomi. Dua kebijakan yang dilaksanakan secara bersamaan menyebabkan implementasinya tidak maksimal dan tidak konsisten. Pada akhirnya dua tujuan yang ingin dicapai yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virusnya dan perbaikan ekonomi pun belum bisa dicapai, bahkan cenderung semakin parah. Dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 misalnya.

Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Selain

⁹ Pemerintah Provinsi Lampung, "Data COVID-19 Di Provinsi Lampung," Pemerintahan, Website Informasi COVID-19 Pemerintah Provinsi Lampung, February 1, 2022, diakses pada 2 Februari 2022

itu, dengan adanya himbauan “*stay at home*” kepada masyarakat akan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan, aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya. Sosial atau *physical distancing* ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan¹⁰

Krisis akibat COVID-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya.¹¹ Eksternalitas COVID-19 ini telah melemahkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya.

Pendapatan yaitu jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan rata-rata setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita serta menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi.¹²

Dampak yang paling mengerikan dari COVID-19 bukan hanya kematian atas virus itu sendiri saja, melainkan juga kematian akan kemiskinan dan kelaparan akibat banyak tidak mendapatkan pendapatan lagi.

Berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 34.559 pelaku usaha di Indonesia pada Juli 2020, Dampak pandemi terhadap penurunan pendapatan masyarakat Indonesia berbeda menurut skala perusahaan (mikro, kecil,

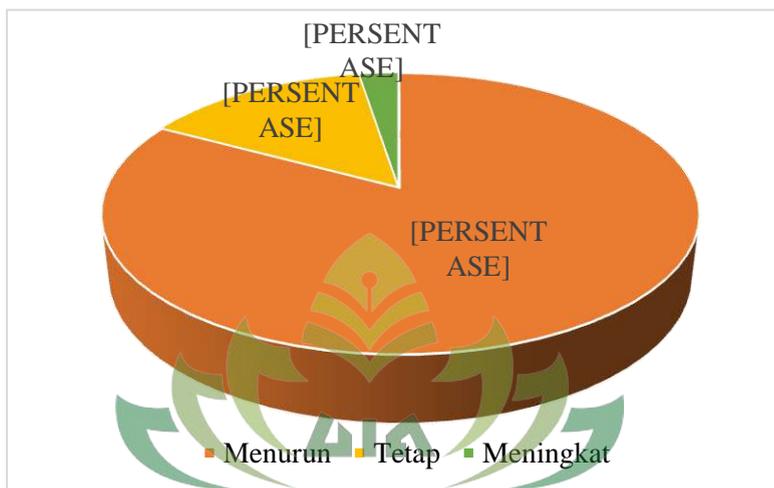
¹⁰ Yamali and Putri, “Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” h. 386

¹¹ Kurniawansyah Et Al., “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia.”, h. 134

¹² Septi Rindawati, *Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan* (Media Sains Indonesia, 2021). h. 5

menengah dan besar). Ada 82,85% perusahaan di Indonesia yang terdampak Oleh pandemi COVID-19. Berikut persentase perusahaan menurut perubahan pendapatan.¹³

Gambar 1
Persentase Perubahan Pendapatan Masyarakat



Sumber: bps.go.id (2020)

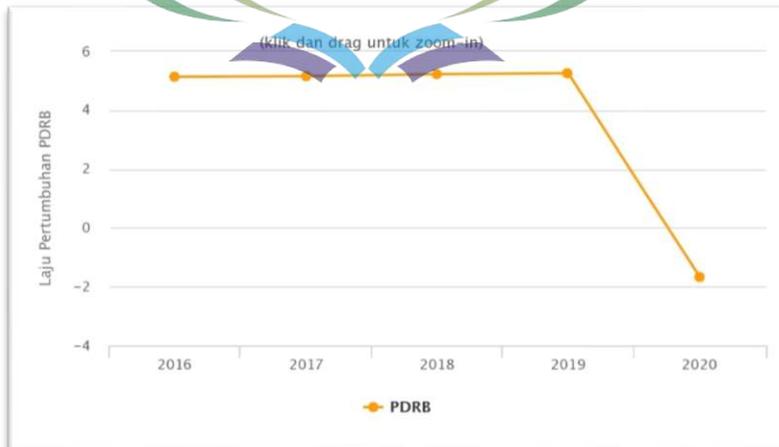
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa hanya terdapat 2% masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan 15% tetap dan 83% masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Secara umum, 8 dari 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Menurut sektornya, usaha akomodasi dan makan/minum merupakan sektor usaha yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yakni sebesar 92,47%. Selain itu, jasa lainnya menjadi sektor yang mengalami penurunan pendapatan terbanyak kedua, yakni sebesar 90,90%. Posisi tersebut kemudian disusul Oleh sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 90,34%. Di posisi ke-empat ada sektor konstruksi yang

¹³ Subdirektorat Indikator Statistik, *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha* (BPS RI, 2020). h. 8

mengalami penurunan pendapatan sebesar 87,94%, kemudian sektor industri pengolahan dengan penurunan pendapatan sebesar 85,98%, dan sektor perdagangan yang penurunan pendapatannya sebesar 84,60%.¹⁴

Sedangkan di Lampung, badan pusat statistik mencatat pertumbuhan ekonomi lampung 2020 mengalami kontraksi 1,67 persen mengakibatkan produk *domestic* regional bruto per kapita turun ketimbang 2019. Pada pada 2020 PDRB perkapita tercatat 41,62 juta rupiah. Hal ini lebih rendah dibanding capaian 2019 yang tumbuh sebesar 5,26 persen. Ekonomi provinsi Lampung triulan IV 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,26 persen dibanding triwulan IV 2019. Kemudian ekonomi provinsi Lampung triwulan IV 2020 mengalami kontraksi 8,28 persen dibanding triwulan III 2020.¹⁵

Gambar 2
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Provinsi Lampung



Sumber: bps.go.id

¹⁴ Ibid. h. 8

¹⁵ “Pertumbuhan Ekonomi Lampung,” Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020, <https://lampunng.bps.go.id>.

Dinas tenaga kerja Provinsi Lampung mencatat selama COVID-19 sebanyak 3.263 pekerja kehilangan pekerjaan yang secara otomatis menurunkan pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 sebesar 4,69 persen, naik 0,02 persen poin dibandingkan Agustus 2020.¹⁶

Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional pada September 2020 jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di Lampung mencapai 1.09 juta orang (12,76 %), mengalami kenaikan sebesar 41,82 ribu orang dibandingkan dengan kondisi maret 2020 sebesar 1,05 juta orang (12,34%) hal ini terjadi karena menurunnya tingkat pendapatan masyarakat.¹⁷

Kajian Islam Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. Beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini.¹⁸ Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT. berfirman:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا ۚ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya

¹⁶ Vera Afrianti, “3.263 Pekerja Kena PHK Dan Dirumahkan Terbanyak Lampung Tengan,” Rmollampung, 2021, <https://www.rmollampung.id>.

¹⁷ Budiharto Setyawan, *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung*, vol. 17, 4 (Bandar Lampung: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, 2021). h. 119

¹⁸ Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease COVID 19 Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020): 555–64.

kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah [9]: 51).

Beberapa penelitian juga telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai eksternalitas ekonomi atau dampak ekonomi secara tidak langsung dari COVID-19. Menurut Henri Kurniawan, faktor penyebab terjadinya eksternalitas ekonomi adalah ketika pemerintah melakukan penanganan COVID-19 dengan *lock down* dan PSBB. Upaya penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 yang dapat dilakukan yaitu pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi yang harus ditopang dengan formulasi dan strategi kongkrit yang sesuai dengan kondisi empirisnya.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Wijaya, eksternalitas terjadi ketika kantor, pusat pembelajaran, pusat wisata, rumah sakit dan fasilitas lainnya seperti transportasi publik tidak menyiapkan pencegahan dini dari COVID-19 masyarakat lebih takut kehilangan pendapatan dari pada kehilangan nyawa.²⁰ Penelitian yang dilakukan Zachary A. Bethune dan Anton Korinek mengatakan bahwa antara kegiatan ekonomi dan COVID-19 yang menjadi faktor penyebab eksternalitas adalah kegiatan ekonomi itu sendiri oleh sebab itu langkah penanganan yang optimal adalah dengan mengurangi jumlah infeksi secara tajam tetapi pada tingkat yang signifikan guna mengurangi kasus terinfeksi virus dan meningkatkan pendapatan.²¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peter T. Leeson dan Louis Rouanet membahas bahwa pemerintah telah menanggapi COVID-19 dengan intervensi yang mahal, terutama "*lock down*" yang melarang

¹⁹ Kurniawansyah Et Al., "Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia." h. 138

²⁰ Krisna Wijaya, "Eksternalitas COVID 19" (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, May 1, 2020). h. 2

²¹ Zachary Bethune and Anton Korinek, "Eksternalitas Infeksi COVID-19: Pertukaran Nyawa vs. Mata Pencaharian," *National Bureau of Economic Research*, no. w27009 (2020). h. 33

banyak interaksi komersial dan sosial. Intervensi semacam itu dirasionalkan dengan pandangan bahwa eksternalitas negatif yang besar melekat pada pandemi.²²

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini pada penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 yang dilakukan pemerintah sebagai variabel independen. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pada penelitian penelitian terdahulu mengenai penyebab munculnya eksternalitas pada masa COVID-19 sehingga dibutuhkan penelitian guna membuktikan hasil dari penelitian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi dengan penggunaan masyarakat rentan Lampung sebagai objek penelitian. Hal ini disebabkan karena di Lampung sendiri terdapat 13 ribu orang lebih terpapar virus COVID-19 dan pada akhirnya menyebabkan 3 ribu orang lebih kehilangan pekerjaan yang otomatis menurunkan pendapatan mereka.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu masih terdapat beberapa perbedaan hasil dari para peneliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti ulang **“Strategis Penanganan Eksternalitas Ekonomi Dari Pandemi COVID 19 Ini, Khususnya terhadap penurunan Pendapatan Masyarakat Lampung berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah”**.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 di provinsi Lampung. Penelitian ini akan terfokus untuk mendeskripsikan dan menjabarkan bagaimana kebijakan penanganan COVID-19. Dari fokus ini dibagi menjadi beberapa sub fokus yaitu :

1. Jenis penanganan eksternalitas COVID-19 pada tingkat pendapatan masyarakat Lampung

²² Peter Leeson and Louis Rouanet, “Eksternalitas Dan COVID-19,” *Southern Economic Journal* 87, no. 4 (2021): 1–12.

2. Dampak dari penanganan COVID-19 pada tingkat penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat Lampung?
2. Bagaimana strategi penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat dikaji berdasarkan prinsip ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menguji, menganalisis, dan menemukan suatu pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat menurut pespektif islam

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berkembang. Selain itu untuk memberikan sumbangsih bagi

khazanah pemikiran islam pada umumnya civitas akadein fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lapisan masyarakat serta pemerintah daerah untuk mendeskripsikan dan mengetahui konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari pandemi COVID-19.

G. Tinjauan Pustaka

Penulis menelusuri beberapa literatur untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, dengan menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan eksternalitas COVID-19 terhadap perekonomian yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Kurniawansyah pada tahun 2020 dengan judul “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari COVID - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia”. Penelitian ini membahas orientasi terhadap eksternalitas ekonomi dari pandemi COVID-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi guna menekan lonjakan terinfeksi virus dan menurunnya pendapatan.²³
2. Penelitian yang dilakukan Krisna Wijaya pada tahun 2020 dengan judul “Eksternalitas COVID-19” yang berisi sudah seharusnya semua pihak turut bertanggung jawab dalam penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19. Pihak pemerintah menerima pajak dari pelaku usaha dan lainnya dapat mealokasikan dananya untuk pandemi COVID-19 dari

²³ Kurniawansyah et al., “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia.” h. 132

pajak. Pihak pelaku ekonomi lainnya dapat berpartisipasi dalam bentuk kepedulian sosialnya (*corporate social responsibility*). Beberapa hal memang sudah dilakukan, termasuk yang terakhir adalah memberlakukan bekerja dari rumah (BDR). Namun karena ada pengecualian yang tidak dianjurkan BDR, maka harus ada tanggung jawab tambahan bagi pemberi kerja.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zachary A. Bethune dan Anton Korinek pada tahun 2020 yang berjudul “Eksternalitas Infeksi COVID-19: Pertukaran Nyawa vs. Mata Pencaharian”. Penelitian ini berisi eksternalitas muncul ketika interaksi sosial dan ekonomi menularkan penyakit menular seperti COVID-19. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih takut kehilangan pendapatan daripada kehilangan nyawa. Kehilangan pendapatan merupakan biaya yang tidak sebanding dengan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kebijakan yang optimal adalah mengurangi jumlah infeksi secara tajam tetapi pada tingkat yang signifikan²⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Peter T. Leeson dan Louis Rouanet pada 2021 yang berjudul “Eksternalitas dan COVID-19”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah menanggapi COVID-19 dengan intervensi yang mahal, terutama “*lock down*” yang melarang banyak interaksi komersial dan sosial. Intervensi semacam itu dirasionalkan dengan pandangan bahwa eksternalitas negatif yang besar melekat pada pandemi, karena dengan adanya *lock down* segala aktifitas perekonomian akan terhambat yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan masyarakat.²⁶

²⁴ Wijaya, “Eksternalitas COVID 19.”

²⁵ Bethune and Korinek, “Eksternalitas Infeksi COVID-19: Pertukaran Nyawa vs. Mata Pencaharian.” h. 1

²⁶ Leeson and Rouanet, “Eksternalitas Dan COVID-19.”

Tabel 1.2
Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti (Tahun)	Sumber	Hasil (Kesimpulan)
1	Heri Kurniansyah, (2020)	<i>Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities</i>	Strategi yang tepat dalam menangani eksternalitas ekonomi dari COVID-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi, untuk menekan lonjakan virud dan penurunan pendapatan
2	Krisna Wijaya (2020)	LPPI	Sudah seharusnya semua pihak turut bertanggung jawab terhadap eksternalitas ekonomi dari COVID. Pihak pemerintah dapat mealokasikan dana pajak untuk pandemi COVID-19. Pihak pelaku ekonomi lainnya dapat berpartisipasi dalam bentuk kepedulian sosialnya (<i>corporate social responsibility</i>).
3	Zachary A. Bethune dan Anton Korinek (2020)	<i>National Bureau of Economic Research</i>	Agen yang berperilaku secara individual secara rasional menghasilkan eksternalitas yang besar karena mereka tidak menginternalisasi efek kegiatan ekonomi dan sosial mereka pada risiko infeksi orang lain dan karena itu terlibat dalam jarak sosial yang tidak memadai. Masyarakat lebih takut mati kelaparan dari pada mati karena sakit. Jika pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang bergantung pada status epidemiologis individu,

			misalnya karena sifat COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala atau kurangnya pengujian yang memadai, maka kebijakan yang optimal adalah mengurangi jumlah infeksi secara tajam tetapi pada tingkat yang signifikan
4	Peter T. Leeson dan Louis Rouanet (2021)	<i>Southern Economic Journal</i>	Pemerintah telah menanggapi COVID-19 dengan intervensi yang mahal, terutama "lock down" yang melarang banyak interaksi komersial dan sosial. Intervensi semacam itu dirasionalkan dengan pandangan bahwa eksternalitas negatif yang besar melekat pada pandemi COVID. Hal ini karena dengan adanya <i>lock down</i> segala aktivitas perekonomian terhambat

Sumber: Data diolah 2022

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Kurniansyah yaitu: secara teoritis penelitian ini dan penelitian Heri Kurniawan sama-sama menggunakan teori eksternalitas. terdapat kesamaan penggunaan variable bebas yaitu eksternalitas ekonomi dari COVID-19. Selain itu secara praktis juga terdapat kesamaan penggunaan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari *mapping issue*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Heri Kurniansyah terletak pada penambahan variabel terikat, pada penelitian Heri Kurniansyah variabel terikat yang digunakan lebih luas. Pada penelitian ini variabel terikat lebih khusus yaitu pada penurunan pendapatan masyarakat. Selain itu perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Heri Kurniansyah yaitu objek penelitian. Objek penelitian Heri

Kurniawan yaitu masyarakat rentan Indonesia sedangkan pada penelitian ini masyarakat Lampung.²⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Krisna Wijaya yaitu : kesamaan menggunakan variabel Eksternalitas Ekonomi. Selain itu metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek penelitian masyarakat rentan lampung sedangkan penelitian Krisna Wijaya Masyarakat Indonesia. Penelitian Krisna Wijaya menggunakan metode analisis teoritis yaitu memastikan bahwa teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan yang ada dalam penelitian telah benar secara ilmu pengetahuan.²⁸

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zachary A. Bethune dan Anton Korinek yaitu: variabel yang digunakan sama yaitu eksternalitas ekonomi. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dimana Bethune dan Korinek mengintegrasikan aktivitas makroekonomi ke dalam model SIS dan SIR epidemiologis untuk menganalisis dan mengukur eksternalitas yang muncul. Sedangkan pada penelitian ini untuk menganalisis dan mengukur eksternalitas yang muncul yaitu dengan menggunakan *mapping issue* dengan melakukan wawancara. Selain itu perbedaan yang paling mendasar penelitian ini dengan penelitian Bethune dan Korinek terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian ini yaitu masyarakat lampung sedangkan objek penelitian Bethune dan Korinek adalah kegiatan ekonomi dan sosial manusia.²⁹

Penelitian ini juga terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian Peter T. Leeson dan Louis Rouanet. Persamaan kedua

²⁷ Kurniawansyah et al., “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia.” h. 132

²⁸ Wijaya, “Eksternalitas COVID 19.” h. 3

²⁹ Bethune and Korinek, “Eksternalitas Infeksi COVID-19: Pertukaran Nyawa vs. Mata Pencapaian.” h. 1

penelitian ini yaitu secara teoritis menggunakan teori eksternalitas, variabel yang digunakan yaitu eksternalitas dan COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu Analisis Kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian Leeson dan Rouanet yaitu penelitian ini dilakukan di Lampung.³⁰

H. Metode Penelitian

1. Dasar Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus kajian pada eksternalitas ekonomi dari COVID-19, khususnya pada masyarakat rentan, beserta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹ Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari

³⁰ Leeson and Rouanet, "Eksternalitas Dan COVID-19." h. 10

³¹ Resti Ruskarini, "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran Sejarah Pendidikan Islam Di MTs N An-Nur Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kebudayaan Kampar" (Thesis, Riau, Universitas Islam Riau, 2017).

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.³²

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Makna dan proses (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak pernah terlepas dari istilah analisis fenomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan yakni dengan wawancara kepada masyarakat terkait dengan strategi penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 serta dampaknya terhadap penurunan pendapatan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan seperti textbook, jurnal, artikel ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang konsep yang diteliti.³⁴ Dalam penelitian ini data

³² Luluk Farida, "Konsep Diri Terapis Anak Berkebutuhan Khusus Di Pendidikan Khusus Autis Cahaya Harapan Rejomulyo" (Skripsi, Kediri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2017). h.27

³³ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, 1st ed. (Jakarta: PT Setia Purna Inves, n.d.). h. 8

³⁴ Ibid. h. 79

yang diambil yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19, data keuangan, data-data statistik terkait dengan judul skripsi ini, serta data pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap terkait tema penelitian, maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data pustaka dan data lapangan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan bahasa verbal atau komunikasi dengan maksud memperoleh keterangan. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang-kadang disertai jawaban-jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat Lampung yang merupakan angkatan kerja yang rentan terkena eksternalitas dari COVID-19 seperti kelompok usaha yang membutuhkan keramaian masa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh, sopir, ojek *online* pelaku UMKM dan lainnya.

Untuk memudahkan penelitian, penulis mengambil sampel di 3 kabupaten/kota yaitu Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu. Hal ini karena

³⁵ Istikomah, "Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). h.17

Bandar Lampung, Peringsewu dan Pesawaran merupakan kabupaten/kota yang paling rentan terdampak COVID-19 terutama Bandar Lampung dan Pringsewu yang bisa dikatakan sebagai pusat industri dan pendidikan. Sementara Pesawaran sendiri sebagai pusat wisata sehingga akan rentan terdampak COVID-19³⁶

Sementara untuk sample sendiri dalam pernyataan Nasution mengatakan bahwa metode kualitatif menggunakan pemilihan sample berdasarkan tujuan penelitian, dan sample yang digunakan cenderung sedikit. Penelitian ini tidak ada menggunakan istilah seperti populasi, namun disebut sebagai situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (seperti kutipan-kutipan dari catatan, transkrip, surat kabar dan gambar-gambar).³⁷ Dokumentasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh data tentang eksternalitas ekonomi dari COVID-19 pada masyarakat Lampung. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data pendukung tentang seberapa besar eksternalitas COVID-19 yang terjadi di Lampung yang dapat menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat.

4. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis yaitu yang menggambarkan keadaan yang sedang

³⁶ Hery Taryana, "Implementasi Pembinaan Kinerja Guru Pada SMP 3 Padelarang Kabupaten Bandung Barat" (Thesis, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesi, 2010).

³⁷ Farida, "Konsep Diri Terapis Anak Berkebutuhan Khusus Di Pendidikan Khusus Autis Cahaya Harapan Rejomulyo." h. 36

berlangsung pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada.³⁸

Metode analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (*intangible*). Dalam penelitian kualitatif, metode analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis".³⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi

³⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1988).

³⁹ Ajif Praditia, "Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013). h. 37

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang dekaligus dikaji dengan teori teori yang sebelumnya telah dijelaskan di BAB II

c. Generalisasi

Generalisasi adalah penarikan kesimpulan umum dari analisis penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat peneliti menari kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam enam 5 bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang diambil dari beberapa kutipan (buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya) yang berupa pengertian, faktor-faktor dal lain lain

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta-fakta penelitian. Bagian ini juga mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan

fokus dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis data penelitian berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada BAB III.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yaitu pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian





BAB II LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

1. Stakeholder Theory

Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute. Freeman mendefinisikan stakeholder sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.*” bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik, sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.⁴⁰

Bryson mendefinisikan stakeholder ialah suatu individu, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat.⁴¹

⁴⁰ Muna Mahdiyyah Haisir, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earning Response Coefficient” (Thesis, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). h. 17

⁴¹ Ibid. h. 17

Hubungan teori *stakeholder* dengan penelin ini yaitu menunjukkan bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan akan menekankan kepentingan rakyat misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Pemerintah melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 namun pemerintah juga harus memerhatikan kesejahteraan rakyat.⁴²

2. *A Theory of Human Motivation*

Teori ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain.⁴³

Moslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Menurut Maslow, pemuasan kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan yaitu: motivasi kekurangan (*deficiency motivation*) dan motivasi perkembangan (*growth motivation*). Motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan motivasi pertumbuhan didasarkan pada kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang.⁴⁴

Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan ini seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur dan oksigen. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi

⁴² Ibid. h. 12

⁴³ Bob Poston, "Maslow's Hierarchy of Needs," *Association of Surgical Technologists*, the surgical technologist, 2009. h. 348

⁴⁴ Haroen Hartiah, *Teknik Prosudural Keperawatan: Konsep Dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008). h.2

paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan manusia.

Hubungan teori Moslow dengan penelitian ini yaitu pada situasi pandemi saat ini terdapat eksternalitas dari COVID-19 salah satunya yaitu penurunan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dalam beberapa kasus mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Selain intervensi dari pemerintah eksternalitas ini dapat diatasi oleh masyarakat dengan adanya motivasi kekurangan.⁴⁵

3. Teori Al-Ghazali

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan public.⁴⁶

Secara umum sosio ekonomi, Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep masalah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer.⁴⁷

Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak dipenuhi kehidupan dunia akan

⁴⁵ Poston, "Maslow's Hierarchy of Needs." h. 349

⁴⁶ Lilik Rahmawati, "Konsep Ekonomi Al-Ghazali," *Maliyah*, 2, No. 1 (2012).

⁴⁷ Moh Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," *Islamic Banking*, 1, No. 1 (2015).

runtuh dan kemanusiaan akan binasa, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi; Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama.⁴⁸

Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya, negara harus bertanggungjawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Di samping itu, ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat.⁴⁹

Menurut Al-Ghazali negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa: "negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Rahmawati, "Konsep Ekonomi Al-Ghazali."

mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.⁵⁰

Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerja sama. Namun, kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi.⁵¹

Menurut Al-Ghazali untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Bahkan, Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. "Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan, kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas negara kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selalu berdoa semoga kemalangan menimpanya." Bahkan negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal dimana "Tentara diperlukan untuk mempertahankan dan melindungi orang dari perampok. Harus ada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, hukum dan peraturan diperlukan untuk mengawasi perilaku orang-orang dan untuk stabilitas sosial. Hal-hal ini merupakan fungsi-fungsi penting pemerintah yang hanya dapat dijalankan oleh ahlinya, dan bila mereka mengerjakan aktivitas-ktivitas ini, mereka tidak dapat

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam."

meluangkan waktu untuk terlibat dalam industri lainnya dan mereka memerlukan dukungan bagi penghidupannya.⁵²

B. Eksternalitas

1. Pengertian Eksternalitas

Pendapat oleh Rosen menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi diluar mekanisme pasar (*non market mechanism*).⁵³ Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan (utilitas atau keuntungan) beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain di dalam perekonomian.

Menurut Gregory Mankiw Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/ pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan maka disebut eksternalitas positif.⁵⁴

Menurut Karl dan Ray eksternalitas muncul apabila tindakan atau keputusan satu orang atau satu kelompok orang membebankan biaya atau memberikan manfaat ke pihak kedua atau ke pihak ketiga.⁵⁵ Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain diluar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut dengan tumpahan atau efek lingkungan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa eksternalitas adalah dampak secara tidak langsung yang tidak

⁵² Rahmawati, "Konsep Ekonomi Al-Ghazali."

⁵³ Nina Elanda and Abd Jamal, "Potret Dan Eksternalitas Pengemis Di Kota Banda Aceh," *Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 3, no. 4 (November 2018). h. 133

⁵⁴ "Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." h. 22

⁵⁵ Rischa Sherliyana Dewi, Amelia Murtisari, and Yanti Saleh, "Dampak Eksternalitas Industri Tahu Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo," *Agronesia*, 3, No. 3 (July 2019). h. 203

diharapkan yang dirasakan oleh lingkungan sekitar akibat adanya suatu aktivitas Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut.

2. Indikator Eksternalitas

Eksternalitas dapat meliputi manfaat dapat juga berupa beban atau biaya yang disebabkan karena adanya suatu aktifitas tertentu. Manfaat atau beban ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang kontak langsung dengan yang menjadi penyebab. Syarat terjadinya eksternalitas ada dua yaitu:

- a. Adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan
- b. Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Eksternalitas

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan eksternalitas antara lain⁵⁶:

- a. Keberadaan barang publik
Barang publik (*public goods*) yang sering disebut barang sosial (*social goods*) atau barang kolektif (*collective goods*) adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk turut menikmatinya, barang yang tidak ada tandingannya dalam konsumsi dan/atau manfaat tidak bisa dipisahkan.
- b. Sumber daya milik bersama
Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya-sumber daya dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya-sumber daya milik umum ini merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis.

⁵⁶ Nova Rahma Zunita, "Analisis Eksternalitas Peternakan Burung Puyuh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Kediri, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2019). h.13

c. Kegagalan pemerintah

Terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan pemerintah yaitu:

- 1) Campur tangan pemerintah kadang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalkan saja, kebijakan pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik, ternyata membawa dampak permintaan tembakau menurun sehingga pendapatan petani tembakau menurun.
- 2) Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar dari pada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
- 3) Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender, dan sistem yang kompleks.
- 4) Perilaku pemegang kebijakan pemerintah bersifat mengejar keuntungan pribadi atau *rent seeking behavior*

4. Eksternalitas dalam Ekonomi Islam

Eksternalita menurut Henry Faizal Noor adalah dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi sosial pihak lain, baik positif maupun negatif atau dampak dari keberadaan suatu usaha, yang berkaitan dengan masalah keadilan yang terjadi di masyarakat. dengan demikian, eksternalitas mempengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi masing-masing pelaku ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan.⁵⁷

Pada prinsipnya keadilan sangat ditekankan dalam perekonomian islam kepada seluruh umat manusia yang

⁵⁷ Nova Rahma Zunita, “Analisis Eksternalitas Peternakan Burung Puyuh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Kediri, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2019). h. 24

terdapat kesamaan perlakuan demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekadar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik masyarakat secara keseluruhan.

Seorang muslim harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah fil ardhi* (pemimpin di bumi) yang harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Seorang muslim meyakini apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk kebaikan, dan apapun yang Allah berikan kepada manusia sebagai sarana untuk menyadarkan fungsinya sebagai pengelola bumi (*khalifah*).⁵⁸ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 30:



 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ

 فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ

 اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”

Tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* adalah mengelola *resources* yang telah di sediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan harus di hindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan di bumi. Dengan demikian segala macam kegiatan ekonomi yang di anjurkan untuk

⁵⁸ “Eksternalitas Produk CPO Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Ekonomi Islam.”, h. 88

mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan *utility* atau nilai guna *resources* tidak disukai dalam Islam.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*al-nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartitemeliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).⁵⁹

Menurut Al-Ghazali negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa: ”negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.” Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerja sama.⁶⁰

Namun, kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat

⁵⁹ Lilik Rahmawati, “Konsep Ekonomi Al-Ghazali,” *Maliyah*, 2, no. 1 (2012). h. 333

⁶⁰ *Ibid.* h. 342

esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi.

Menurut Al-Ghazali untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Bahkan, Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Menurut Al-Ghazali pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur.⁶¹

5. Eksternalitas Ekonomi dari COVID-19

Dalam konteks penyakit menular, perilaku yang dapat menimbulkan eksternalitas ekonomi adalah: yang mempengaruhi perekonomian orang lain. Perilaku seperti itu banyak terjadi ketika pemberlakuan kebijakan *lock down* atau PSBB.

Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-sehari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan Nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan Nasional

Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang

⁶¹ Moh Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," *Islamic Banking*, 1, no. 1 (2015). h. 56

sedang marak terjadi. Kebijakan yang ada tersebut secara langsung berdampak positive namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak *negative*, salah satunya yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁶²

Sangat menggoda untuk mengukur biaya sosial dari eksternalitas COVID-19, dengan nilai pendapatan masyarakat yang menurun karena *lock down* dan PPKM, itu juga salah. Terkait COVID-19 penurunan pendapatan itu adalah tragis, dan itu adalah biaya.

6. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari COVID-19

Secara normatif pemerintah telah mengeluarkan 9 (sembilan) produk hukum terkait penanganan COVID-19 ini, yaitu 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres), dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Keseluruhan peraturan tersebut merupakan respon atas eskalasi masalah, baik dari sisi kesehatannya, birokrasi, politik, maupun keuangan negara dalam penanganan COVID-19 ini.⁶³

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar, sementara itu menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19. Meskipun begitu hal ini

⁶² Zulkipli, "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021). h. 387.

⁶³ Kurniawansyah Et Al., "Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia." h.133

secara tidak langsung berdampak pada wilayah lain yang tidak terinfeksi COVID-19.

Sementara itu dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 maka gubernur Lampung mengeluarkan peraturan nomer 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di provinsi Lampung.⁶⁴ Pemerintah Lampung juga mengeluarkan 6 kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 yaitu:⁶⁵

- a. Memastikan refocusing anggaran diimplementasikan dengan cepat sesuai aturan pendukung, petunjuk teknis dan kelembagaan yang telah ditetapkan
- b. Eksekusi anggaran kesehatan secara cepat dan tepat khususnya untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19
- c. Memastikan bahwa kelompok ekonomi yang paling rentan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menyegerakan realisasi program-program bantuan sosial seperti program PKH, BPNT, subsidi serta implementasi penangguhan beban cicilan kredit/utang masyarakat
- d. Jaminan keberlangsungan operasional dan insentif usaha khususnya pada sektor yang terdampak cukup dalam seperti transportasi, perdagangan, akomodasi/restoran (pariwisata) dan industri padat karya yang mengalami penurunan omset cukup tajam.
- e. Sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan penyesuaian ulang terhadap belanja dan anggaran

⁶⁴ “Pergub Lampung Nomor 45 Tahun 2020,” <https://peraturan.bpk.go.id>.

⁶⁵ Administrator, “Enam Kebijakan Upaya Provinsi Lampung Dalam Mengantisipasi Dampak Ekonomi COVID-19,” 2020, <http://bappeda.lampungprov.go.id>.

pembangunan agar upaya penanggulangan COVID-19 berjalan produktif dan optimal serta tepat sasaran

- f. Menjaga stabilitas ekonomi dan terus membangun keyakinan masyarakat terhadap kinerja ekonomi melalui analisis dan evaluasi kebijakan dampak COVID-19 terhadap perekonomian dari waktu ke waktu, serta mengambil langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, guna menopang pertumbuhan ekonomi tetap baik dan berdaya tahan

Pemerintah memiliki beberapa kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai bentuk dan jenis kebijakan 90 bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), (5) Kartu sembako, dan (6) Subsidi listrik.⁶⁶

- a. Program Keluarga Harapan

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu JPS untuk keluarga pra sejahtera. Tujuan PKH adalah memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi dan gizi, serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, disabilitas berat, dan orang lanjut usia. Selain itu juga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga pra sejahtera agar terhindar dari resiko sosial selama pandemi COVID-19 berlangsung. Selama pandemi, penyaluran PKH mengalami kenaikan sebanyak 25% dari 9.2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bertambah menjadi 10 juta KPM.

⁶⁶ Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak COVID-19 Di Indonesia," Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2, No. 1. h.90

Adapun nominal bantuan PKH yang didistribusikan sebesar 250 ribu rupiah per bulan untuk kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, 75 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), 125 ribu rupiah untuk kategori siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 166 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara untuk kategori penyandang disabilitas berat dan peserta PKH berusia lebih dari 70 tahun ke atas memperoleh bantuan sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Bantuan sosial PKH tersebut diberikan maksimal untuk empat jiwa dalam satu keluarga.

Terdapat modifikasi frekuensi dalam pendistribusian PKH di masa pandemi COVID-19. Umumnya bantuan PKH disalurkan per triwulan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, namun saat pandemi pendistribusian bantuan diberikan setiap bulan dari April sampai Desember 2020. Bantuan akan ditransfer kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Sedangkan bagi peserta yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara, bantuan bisa diambil di e-warong atau agen bank⁶⁷

Syarat penerima PKH antara lain:

- 1) Keluarga miskin atau prasejahtera
 - 2) Memiliki anggota keluarga yang hamil atau menyusui
 - 3) Memiliki anak usia dibawah 6 tahun
 - 4) Memiliki nak usia sekolah
 - 5) Memiliki keluarga lansia diatas 60 tahun
 - 6) Penyandang disabilitas
- b. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah semenjak awal mula terdeteksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. BST memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yaitu dengan menysasar sembilan juta rakyat kurang mampu di 33 provinsi selain wilayah Jabodetabek,

⁶⁷ Ibid. h. 91

baik yang telah ataupun belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dasar hukum pemberian bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/ dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan jaring pengaman sesuai yang diamanatkan didalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tanggal 16 April 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019.⁶⁸

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah:

- 1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
- 2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
- 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.⁶⁹

c. BLT Dana Desa

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari

⁶⁸ Maria Prudensiana, Novi Theresia, and Clarce Sarliana, "Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)," *OECOMICUS*, 5, no. 2 (2021). h.108

⁶⁹ *Ibid.* h.109

pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.⁷⁰

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

- 1) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen;
- 2) Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen;

⁷⁰ Carly Erfly Fernando Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Politico*, 9, No. 2 (2020). h.6

- 3) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.⁷¹

Tujuan diadakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi akibat adanya wabah COVID-19. Sasaran dari penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Serta masyarakat miskin baik yang sudah terdata ataupun belum terdata dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun ada kriteria lain yang ditetapkan pemerintah yaitu:

- 1) Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/bukan pemilik Kartu Prakerja
 - 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan).
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- g. Kartu Sembako

Kartu Sembako ialah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan nama terdahulunya yakni Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT. Kartu sembako diberikan kepada keluarga prasejahtera yang rentan terhadap imbas pandemi COVID-19 dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah menyiapkan instrument fiscal Rp.10 triliun, dimana kementerian sosial mendapat Rp.4,56 triliun. Penyaluran program sembako dengan target 15,2 juta KPM oleh kementerian sosial, yang biasanya Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000 setiap bulannya. Selain itu, pemerintah juga memperluas jangkauan program sembako bagi 4,8 juta keluarga. Diharapkan dengan

⁷¹ Ibid. h.6

adanya kebijakan itu, masyarakat mampu hidup sehat ditengah COVID-19.⁷²

Saat ini terdapat beragam varian komoditas bahan pangan yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat. Bila sebelumnya masyarakat hanya dapat berbelanja sembako berupa beras atau telur, sekarang masyarakat memiliki banyak pilihan untuk membelanjakan bahan pangan lainnya seperti karbohidrat (singkong, jagung, ubi, sagu, serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging merah, ikan), protein nabati (tahu, tempe, juga kacang-kacangan), dan vitamin mineral seperti sayur-mayur serta buah-buahan.

Penerima kartu sembako harus terdaftar di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) karena penyalurannya melalui rekening ke bank Himbara. Penerima bantuan sosial yang telah menerima kartu sembako bisa membelanjakan uang sembako di elektronik warung gotong royong (*e-warong*) terdekat.

h. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Salah satu program pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional adalah memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Program ini telah berjalan dari tahun 2020 dan sudah sampai pada tahap keempat. Tujuan pemerintah membuat program ini juga untuk membantu pelaku usaha mikro yang mengalami kerugian akibat wabah pandemi COVID. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia sebanyak 28,8 triliun, untuk program BPUM pemerintah telah menargetkan 12 juta yang di bagikan kepada pelaku usaha mikro, sehingga dana bantuan yang diperoleh setiap pelaku usaha yang mendaftar dan terpilih sebagai penerima BPUM sebanyak 2,4 Juta.⁷³

⁷² Early Febriana, "Program Sembako Untuk Masyarakat Rentan Hadapi Pandemi-19," Pemerintahan, PUSPENSOS, 2020.

⁷³ Fahriza Nurrahma, Khusnul Khotimah, and Sifa Veronica Islamay, "Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro," Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 5, no. 1 (2022). h. 74

Program BPUM dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu Masyarakat secara langsung mengajukan permohonan sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kepada Diskoperindag kabupaten dan bisa juga melalui perangkat Dusun (RT/ RW/ Kepala Dusun), perangkat Desa, dan Kecamatan setempat sesuai dengan keputusan dari setiap kecamatan. Selanjutnya data pengusul dana bantuan yang masuk ke Diskoperindag Kabupaten di setorkan ke Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi, tahap pengusulan data yang terakhir yaitu mengirimkan data pengusul dana bantuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebagai pelaksana program pemberian dana BPUM kepada pelaku usaha mikro.⁷⁴

Pengertian BPUM dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu:

Pasal 1:

- 1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- 2) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁷⁴ Ibid. h.74

Pasal 2:

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka Program PEN.

i. Subsidi Listrik

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah di tengah pandemi COVID-19 ini, Pemerintah menyiapkan beberapa program perlindungan sosial, salah satunya adalah pemberian/pembebasan listrik gratis untuk pelanggan 450 VA dan diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan 900 VA subsidi.⁷⁵

Sebagaimana fokus Pemerintah untuk melindungi masyarakat lapisan bawah, Pemerintah memberikan pembebasan tagihan listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan daya 900 VA subsidi selama 3 bulan, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni 2020.

Terdapat dua golongan tarif pelanggan yang mendapatkan bantuan, yaitu 450 VA dan 900 VA. Di sisi lain, terdapat dua jenis pelanggan untuk masing-masing golongan tarif tersebut, yaitu Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers virtual tanggal 31 maret 2020 pelanggan pasca bayar (reguler) dan pelanggan pra bayar (token).

Dalam implementasinya, khususnya untuk pelanggan pra bayar, PLN telah berupaya memberikan kemudahan untuk mendapatkan token gratis dimaksud, yaitu dapat dilihat pada website PLN (www.pln.co.id) atau melalui aplikasi whatsapp (08122-123-123). Salah satu petunjuk untuk mendapatkan token gratis adalah memasukkan ID pelanggan atau nomer meter pelanggan. Selain itu, PLN juga akan berupaya bekerja sama dengan perangkat

⁷⁵ Diana Setyawati and Ahmad Su'aidy, "Pembebasan Tagihan/Diskon Listrik Untuk RT 450 VA Dan 900 VA Subsidi," 2020,

pemerintah setingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk memastikan bantuan listrik selama pandemi COVID-19 dapat diterima oleh masyarakat.

Selain beberapa bantuan diatas juga terdapat beberapa kebijakan terkait pandemi COVID-19 diantaranya:

a. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah

Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang berkerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 perusahaan yang terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) tertentu dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).⁷⁶

Insentif pajak merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada orang pribadi maupun badan guna meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan baik saat ini maupun di masa mendatang. Tujuan pemberian insentif pajak DTP ini diungkapkan dalam pertimbangan kebijakan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 bahwa guna menanggulangi dampak COVID-19 yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha, pemerintah perlu mengatur ketentuan terkait pemberian insentif pajak.

Pasal 6 Ayat 1 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 menjelaskan bahwa agar insentif PPh final PP 23 DTP dapat dimanfaatkan, Wajib Pajak PP 23/2018 harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak PP 23/2018 (SKET) terlebih dahulu melalui menu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada akun DJP *Online* milik Wajib Pajak. penyampaian laporan realisasi

⁷⁶ Livana Ph, Resa Hadi Suwoso, And Terri Febrianto, "Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa," Indonesian Journal Of Nursing And Health Sciences, 1, No. 1 (2020). h. 46

pemanfaatan insentif oleh Wajib Pajak PP 23/2018 pasca berakhirnya masa pajak akan diperlakukan sebagai pengajuan SKET. bagi Wajib Pajak yang menyerahkan fotokopi Surat Keterangan (SKET) kepada pemotong atau pemungut pajak dan SKET tersebut tervalidasi oleh Sistem Informasi DJP, tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Dengan adanya penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa syarat agar transaksi Wajib Pajak tidak dipotong atau dipungut pajak yaitu dengan menyerahkan fotokopi SKET kepada pemotong atau pemungut pajak.⁷⁷

b. Kelonggaran membayar kredit

Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di antaranya kelonggaran membayar kredit hingga satu tahun. Presiden Joko Widodo mengatakan insentif itu juga dengan penurunan bunga. Meski begitu, ketentuan itu hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah Rp10 miliar. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan sopir taksi. Kelonggaran pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷⁸

Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan debitur untuk mendapatkan kelonggaran atau restrukturisasi kredit, yaitu:

- 1) Debitur terkena dampak virus corona dengan nilai kredit dibawah Rp.10 miliar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR)
- 2) Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimal 1 tahun dalam bentuk penyesuaian

⁷⁷ Erna Rahmawati, "Insentif Pph Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 Bagi Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3, No. 1 (2021). h. 86

⁷⁸ Suwoso And Febrianto, "Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa." h.46

- pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjang waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank
- 3) Mengajukan kepada bank dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank
 - 4) Jika dilakukan kolektif misalkan melalui data yang diberikan kepada bank.⁷⁹
- c. Subsidi kuota internet

Pandemi yang sedang berlangsung ini menyebabkan sektor perekonomian yang tidak seimbang memiliki dampak pada proses pembelajaran yang dilakukan karena baik semua orang tua maupun guru pasti harus mengeluarkan dana lebih untuk menambah pengeluaran. Salah satu pengeluaran lebih tersebut untuk membeli kuota atau internet agar tetap berjalannya proses pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi.

Kebijakan Kemendikbud mengeluarkan program subsidi kuota internet bagi guru dan murid, serta mahasiswa dan dosen cukup signifikan. Program subsidi kuota internet ini dilaksanakan selama empat bulan, yakni dari bulan September sampai Desember 2020. Berdasarkan laporan Pusdatin Kemendikbud RI, bantuan kuota internet tahap I dan II pada September telah tersalurkan ke 27.305.495 nomor telepon seluler (ponsel) pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia.⁸⁰

Berdasarkan surat edaran kemendikbud dengan nomor 8202/C/PD/2020, ada 3 syarat yang mesti siswa penuhi untuk bisa menerima kuota gratis, yakni:

- 1) Siswa aktif per TA 2020/2021
- 2) Terdata diaplikasi dapodik
- 3) Melengkapi data diri (menuliskan nomor telpon yang aktif)

⁷⁹ “Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit Di Bank,” 2020,

⁸⁰ Bramastia And Eka Khristiyanta Purnama, “Program Bantuan Kuota Belajar Kemendikbud Di Masa Pandemi,” *Jurnal Epistema*, 2, No. 1 (2021).h. 12

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit. Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tetapi juga kualitas barang tersebut akan ikut menjadi perhatian.

Pendapatan yaitu jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan rata-rata setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita serta menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi.⁸¹

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi

⁸¹ Rindawati, *Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan*. h. 5

setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁸²

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh:⁸³

- b. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- c. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- d. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Kesempatan kerja yang tersedia

⁸² Septia Nababan, "Pendapatan Dan Jumlah Tanggungan Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi Pns Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado," EMBA, 1, no. 4 (2013). h. 2132

⁸³ Asril Maulana, "Analisis Pendapatan Dan Beban Operasional Dalam Meningkatkan Laba Operasional Pada Pt. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara" (Skripsi, Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

⁸⁴ Ibid.

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

- b. **Kecakapan dan keahlian**
Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- c. **Motivasi**
Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- d. **Keuletan bekerja**
Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- e. **Banyak sedikitnya modal yang digunakan**
Besarnya kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besarnya modal yang dipergunakan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

- a. Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan
- b. Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain
- c. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya

sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:

- a. Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan
- b. Pendapatan dari investasi
- c. Pendapatan dari keuntungan sosial.

3. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan masyarakat merupakan hasil yang diperoleh oleh masyarakat yang berasal dari profesi atau pekerjaan yang mereka jalani. Sumber pendapatan berasal dari berbagai sektor, tergantung pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, pola pendapatan rumah tangga terdiri dari upah dan gaji, dan penerimaan transfer.⁸⁵

Menurut biro pusat statistik, pendapatan terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pendapatan berupa uang, yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan hanya diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra pretasi. Pendapatan jenis ini bersumber dari:
 - a) Gaji dan upah yang diperoleh dari :
 1. Kerja pokok
 2. Kerja sampingan
 3. Kerja lembur
 - b) Usaha sendiri, yang meliputi :
 1. Laba bersih usaha
 2. Komisi
 3. Penjualan hasil home industry
 - c) Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah

⁸⁵ Chintia Dwi Yuliani, "Analisis Dampak Tingkat Pendapatan Dan Perilaku Konsumtif Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). h.

- d) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.
- b. Pendapatan berupa barang, yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dalam bentuk barang atau jasa. Akan tetapi berupa :
 - a) Pengobatan
 - b) Beras
 - c) Transportasi
 - d) Perumahan
 - e) Gratis sewa rumah
- c. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, berupa :
 - a) Pengambilan tabungan/deposito
 - b) Hasil penjualan barang-barang pribadi
 - c) Penagihan piutang
 - d) Hadiah
 - e) Warisan.⁸⁶

4. Pendapatan Dalam Islam

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 29 tersirat tentang pendapatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas

⁸⁶ Ibid. h.34

dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Distribusi pendapatan adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa, dari produsen (penghasil) ketangan konsumen (pemakai) yang membutuhkannya. Pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Dalam Islam kekayaan dan pendapatan harus didistribusikan secara merata untuk mencapai keadilan distribusi dan sosioekonomi yang didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan. Ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nisab*) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai Strategi Penangan Eksternalitas Ekonomi dari COVID-19 pada Masyarakat Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan telah menekankan aspek kepentingan rakyat dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu dapat dilihat dari penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 seperti program penyaluran bantuan PKH, BST, BPUM, insentif pajak, listrik dan Keringanan membayar kredit pada masyarakat Lampung dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat. Meskipun begitu masih terdapat permasalahan pendistribusian bantuan yang dikeluhkan warga. Penyaluran yang tidak merata, menyebabkan kerumunan, kurangnya sosialisasi, serta adanya potongan saat pencairan. Sementara itu sebagian masyarakat juga melakukan upaya penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 yaitu dengan berhemat dalam membelanjakan hartanya, menambah pekerjaan sampingan atau mengubah jenis dagangan mereka dengan harapan mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka yang menurun.
2. Penanganan eksternalitas ekonomi dari COVID-19 yang dilakukan pemerintah melalui program bantuan sosial dengan permasalahan penyaluran yang ada menyebabkan masyarakat merasakan tidak mendapatkan keadilan hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Strategi Penanganan Eksternalitas Ekonomi Dari COVID-19 terhadap penurunan masyarakat Lampung menurut Perspektif Ekonomi Syariah” dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah disarankan meningkatkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam tata laksana penyaluran bantuan sosial pemerintah di masa pandemi ini. Tata laksana yang diharapkan dalam hal ini yaitu mampu memenuhi unsur komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi yang harmonis secara horisontal maupun vertikal. Dari segi horisontal berhubungan dengan kolaborasi antar lembaga atau institusi yang sama kedudukannya. diperlukan kolaborasi yang selaras antar lembaga atau institusi dengan hierarki yang berbeda, seperti kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
2. Masyarakat disarankan mampu berkerja dan kreatif memanfaatkan situasi yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan.
3. Bagi peneliti dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan variabel bebas lainnya yang dapat menyempurnakan penelitian ini.